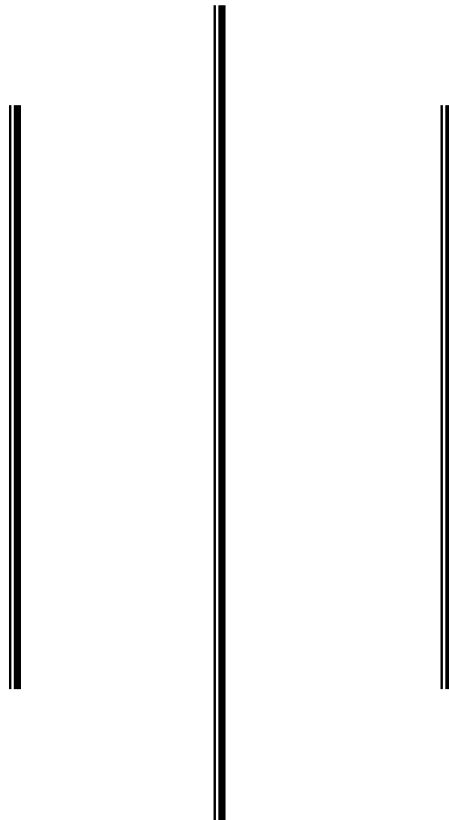




**RANCANGAN AKHIR (RANHIR)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
KECAMATAN PARINGIN SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 dapat dibuat.

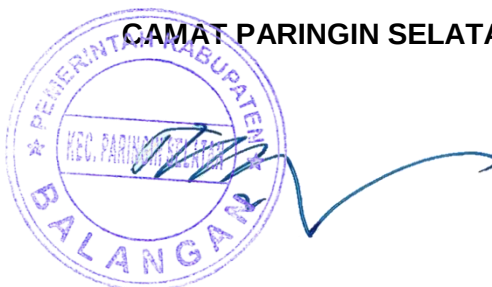
Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Thn 2008.

Pembuatan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Paringin Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Paringin Selatan, Agustus 2024

CAMAT PARINGIN SELATAN,



RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP

NIP. 19870328 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2025. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2025 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2024 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Selanjutnya Renja SKPD Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan

- Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx);
13. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|-----|------|--|--|
| BAB | I. | PENDAHULUAN | Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Paringin Selatan. |
| BAB | II. | HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2023 | Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| BAB | III. | TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN | Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Paringin Selatan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. |
| BAB | IV. | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | Memuat tentang uraian program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaannya. |
| BAB | V | PENUTUP | Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. |

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Paringin Selatan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Paringin Selatan 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2023

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, ada pengurangan jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Paringin Selatan, dimana pada tahun 2024 ada 6 Program dan 14 kegiatan dan 23 Sub kegiatan, sedang di tahun 2023 ada 6 Program dan 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Kantor Kecamatan Paringin Selatan dengan Alokasi Anggaran pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 8.536.824.894,- yang meliputi belanja operasi sebesar Rp. 7.119.658.694,- dan belanja modal berjumlah Rp. 1.417.166.200,-.

Anggaran yang berhasil direalisasi sebesar Rp 7.548.598.242,- atau sekitar 88,42 % dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp 6.146.176.942,- atau 86,33 % dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.402.421.300,- atau 98,96 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)			
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76	Nilai	69,06	Nilai	69,06	Nilai	69,06	Nilai	100%	69,06	Nilai	69,06	Nilai	90,87%
01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	24	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	4	Dokumen	16	Dokumen	66,67%
01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	Dokumen	50%
01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	100%	14	Bulan	42	Bulan	50%
01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	50%
01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	50%
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	50%
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang dipelihara	41	Unit								41	Unit	41	Unit	100%
01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	8	Unit	100	%	100	%	100	%	100%	8	Unit	8	Unit	100%
01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	4	Buah								4	Buah	4	Buah	100%
02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

0 2	2	0 2		penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 2	2	0 2	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 2	2	0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 2	2	0 4	0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
0 3	0 2	0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

					Kecamatan														
03	02	02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah sarana dan Prasarana yang dibangun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
03	02	02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
03	02	02	4	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
05	2	01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
06	2	01	09	Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerapan Peraturan perundang-Undangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
06	2	01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%

2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Paringin Selatan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indikator Persentase capaian sasaran jangka menengah. Persentase renstra SKPD dengan kriteria baik, Persentase renja SKPD dengan kriteria baik, Persentase deviasi program pada RKPD dan APBD, Persentase SKPD dengan anggaran berbasis kinerja, Persentase RKPD Kabupaten/Kota dengan kriteria baik, Persentase program prioritas dengan capaian $\geq 88\%$. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin Selatan masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Paringin Selatan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Paringin Selatan terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, baik faktor-faktor internal, maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2023, kinerja Kecamatan Paringin Selatan masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM	IKK	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85	86	87	88	89	85,11	85,31	87,55	88	89	
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif				-	-	75	75	75	-	-	75	75	75	
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 ada peningkatan. Kinerja Kecamatan Paringin Selatan adalah totalitas hasil kerja yang dicapai Kecamatan Paringin Selatan yang tidak terlepas dari kinerja sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Paringin Selatan, yang dijalankan oleh SDM yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan SKPD tersebut.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin Selatan masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Paringin Selatan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. Meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Paringin Selatan terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Salah satu indikasi kegagalan kinerja adalah adanya beberapa indikator di dalam Renja yang tidak dapat diukur ataupun kesalahan ketika menentukan target capaian. Beberapa kesalahan pengetikan yang cukup prinsip juga masih ditemukan di dalam dokumen Renja. Untuk menekan terjadinya pengulangan kesalahan-kesalahan tersebut, Kecamatan Paringin Selatan terus meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar SDM, serta mengirim SDM Kecamatan Paringin Selatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan SKPD Kabupaten Balangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Kecamatan Paringin Selatan adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja);

3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran;
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan tahun Kedua RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun. Adapun Visi Kepala Daerah Terpilih adalah : **"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"**

Sesuai dengan kerangka sasaran RPJMD Bappeda Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, terdapat 12 Sasaran pembangunan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman;
2. Meningkatnya Indeks lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya angka pengangguran terbuka;
5. Meningkatnya Indeks Pendidikan
6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat;
7. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi;
8. Menurunkan Angka Kemiskinan;
9. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama;
10. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan; dan
12. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Sasaran Pembangunan Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Paringin Selatan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (sasaran ke-7)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (sasaran ke-10)
3. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan (sasaran ke-12)

Tabel T-C.31.
Review terhadap RKPD tahun 2025
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Paringin Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			7.814.962.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Paringin Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			7.814.962.700	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					61.297.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					61.297.500	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	50.827.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	50.827.500	

7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	5.470.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	5.470.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.087.390.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.087.390.744	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	6.002.080.744	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	6.002.080.744	

7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	85.310.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	85.310.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.500.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	34.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	34.500.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	30.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					594.141.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah					594.141.300	

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.209.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.209.800	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	47.075.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	47.075.200	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	26.128.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1	Paket	26.128.200	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	510.728.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Lapor an	510.728.100	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					189.013.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					189.013.500	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel	1	Paket	18.080.800	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel	1	Paket	18.080.800	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	6	Unit	170.932.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	6	Unit	170.932.700	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.716.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.716.656	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	172.754.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	172.754.200	

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	478.962.456	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	478.962.456	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.903.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.903.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	166.903.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	166.903.000	
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Paringin Selatan				290.052.300	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Paringin Selatan				290.052.300	

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					290.052.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					290.052.300	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.630.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapaia n Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Lapor an	50.630.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah LaporanPeningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	239.422.300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah LaporanPeningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan Kepada Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	1	Lapor an	239.422.300	

07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Paringin Selatan				2.195.305.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamata n Paringin Selatan				2.195.305.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					158.527.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					158.527.500	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	37.327.500	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisas i Program Kerja dan Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t yang Dilakukan oleh Pemerinta h dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Doku men	37.327.500	

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	121.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	121.200.000	
07:01:03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.765.256.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.765.256.500	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	331.800.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	331.800.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Jumlah sarana dan Prasarana yang dibangun	2	Unit	144.922.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Jumlah sarana dan Prasarana yang dibangun	2	Unit	144.922.500	

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	2	Pokmas / Ormas	842.086.900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	2	Pokmas / Ormas	842.086.900	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	1	Laporan	446.447.100	Evaluasi Kelurahan		Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	1	Laporan	446.447.100	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					271.521.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					271.521.000	

7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga	271.521.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga	271.521.000	
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Paringin Selatan				54.340.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Paringin Selatan				54.340.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					54.340.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					54.340.000	

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	54.340.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	54.340.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Paringin Selatan				11.720.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Paringin Selatan				11.720.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.720.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.720.000	

7.01.05.2.01.0007	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Dokumen	11.720.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Dokumen	11.720.000	
7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Paringin Selatan				197.620.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Paringin Selatan				197.620.000	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					197.620.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					197.620.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	49.550.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	49.550.000	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	Dokumen	4.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	Dokumen	4.500.000	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	Dokumen	120.720.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	2	Dokumen	120.720.000	

									nan Partisipatif				
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Pendayaguna an dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	22.850.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaat an, Pendayagu naan dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Doku men	22.850.000	
JUMLAH TOTAL						10.564.000.000						10.564.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 126 antara lain dikemukakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut, dapat dikemukakan bahwa Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya di Kecamatan.

Dalam upaya memberdayakan Kecamatan dalam rangka percepatan Otonomi Daerah, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan termasuk tugas pemerintahan lainnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal ini cukup beralasan, sebab camat yang diharapkan sebagai manager ditingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran Pasal 126 ayat (3) tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistic dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat

dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Paringin Selatan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan Paringin Selatan.
5. Mewujudkan profesionalitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif yang pada akhirnya berimplikasi pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Paringin Selatan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (sasaran ke-7)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (sasaran ke-10)

3. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan (sasaran ke-12).

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rancangan rencana strategis (RENSTRA) 2021–2026 kecamatan Paringin Selatan, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. berpedoman pada tahun sebelumnya dan hasil pemetaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Surat Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

9) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan : a. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

11) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

d. Evaluasi Kelurahan

12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sub Kegiatan : a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

13) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan : a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

14) Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan : a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- c. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Balangan

lembar
dari

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kecamatan Paringin Selatan			7.814.962.700					7.616.924.766
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					61.297.500					25.961.230
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	Dokumen	50.827.500	APBD		4	Dokumen	5.961.230
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2	Dokumen	5.000.000	APBD		4	Dokumen	10.000.000

7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	Data	5.470.000	APBD		4	Dokumen	10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.087.390.744					5.986.633.860
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	Orang	6.002.080.744	APBD		25	Orang	5.928.553.860
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dokumen	85.310.000	APBD		12	Dokumen	58.080.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.500.000,00					116.110.000
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	Paket	34.500.000	APBD		1	Paket	104.610.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	Orang	30.000.000	APBD		1	Paket	11.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					594.141.300					562.472.900
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	10.209.800	APBD		1	Paket	14.923.150

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga		1	Paket	47.075.200	APBD		1	Paket	11.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	26.128.200	APBD		1	Paket	42.535.350
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20	Laporan	510.728.100	APBD		20	Laporan	494.014.400
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					189.013.500					206.275.740
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel		1	Paket	18.080.800	APBD		1	Paket	5.500.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan		6	Unit	170.932.700	APBD		6	Unit	200.775.740
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.716.656					547.297.441
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	172.754.200	APBD		12	Laporan	207.158.600
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	478.962.456	APBD		12	Laporan	340.138.841
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					166.903.000					172.173.595

	Daerah										
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12	Unit	166.903.000	APBD		12	Unit	172.173.595
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Paringin Selatan			290.052.300					142.075.010
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					290.052.300					142.075.010
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2	Laporan	50.630.000	APBD		2	Laporan	56.463.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	Laporan	239.422.300	APBD		1	Laporan	85.612.010
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Paringin Selatan			2.195.305.000					1.929.664.240

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					158.527.500					274.987.900
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1	Dokumen	37.327.500	APBD		1	Dokumen	162.787.900
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	Laporan	121.200.000	APBD		1	Laporan	112.200.000
07:01:03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.765.256.500					1.606.276.340
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		6	Lembaga Kemasyarakatan	331.800.000	APBD		6	Lembaga Kemasyarakatan	48.290.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah sarana dan Prasarana yang dibangun		2	Unit	144.922.500	APBD		2	Unit	884.347.440
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		4	Pokmas / Ormas	842.086.900	APBD		4	Pokmas / Ormas	410.000.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan		1	Laporan	446.447.100	APBD		1	Laporan	263.638.900

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					271.521.000					48.400.000
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		10	Keluarga	271.521.000	APBD		10	Keluarga	48.400.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Paringin Selatan			54.340.000					39.300.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					54.340.000					39.300.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1	Laporan	54.340.000	APBD		1	Laporan	39.300.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Paringin Selatan			11.720.000					48.400.000

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.720.000					48.400.000
7.01.05.2.01.0007	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1	Dokumen	11.720.000	APBD		1	Dokumen	48.400.000
7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kecamatan Paringin Selatan			197.620.000					233.125.263
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					197.620.000					233.125.263
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	Dokumen	49.550.000	APBD		1	Dokumen	48.400.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		9	Dokumen	4.500.000	APBD		1	Dokumen	11.000.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1	Dokumen	120.720.000	APBD		1	Dokumen	120.720.000

7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan dan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1	Dokumen	22.850.000	APBD		1	Dokumen	53.005.263
JUMLAH TOTAL						10.564.000.000					10.009.489.279

BAB IV

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng-jawab	Lokasi		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai SAKIP SKPD	Meningkat nya Nilai Akuntabilit as Kinerja						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP SKPD	69,06	69,06		69,06		72,06		72,56		75,56		76,00			
	Meningkat nya Nilai Akuntabilit as Kinerja	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%	3.651.112.400	4 Dokumen	3.361.569.434	4 Dokumen	3.383.940.534	4 Dokum en	3.869.727.517	4 Dokumen	4.217.650.269	4 Dokumen	4.639.415.296		
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6.348.000	4 Dokumen	4.712.500	4 Dokumen	4.777.600	4 Dokumen	5.442.938	4 Dokumen	5.987.232	4 Dokumen	6.585.955		
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	3.174.000	4 Dokumen	4.712.500	4 Dokumen	4.777.600	4 Dokumen	5.442.938	4 Dokumen	5.987.232	4 Dokumen	6.585.955	Kasubbag Perencan aan dan Keuangan	
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.174.000												
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	2.909.713.000	100%	2.990.809.434	100%	3.009.462.934	100%	3.316.990.215	100%	3.648.689.237	100%	4.013.558.160		
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan Perundang- undangan	14 Bulan	14 Bulan	2.807.053.000	12 Bulan	2.923.459.434	14 Jrang/Baula n	2.947.242.934	14 Jrang/Baula n	3.242.146.215	14 Jrang/Baula n	3.566.360.837	14 Jrang/Baula n	3.922.996.920	Kasubbag Perencan aan dan Keuangan	
		7	01	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	102.660.000	12 Bulan	67.350.000	1 Dokumen	62.220.000	1 Dokumen	74.844.000	1 Dokumen	82.328.400	1 Dokumen	90.561.240	Kasubbag Perencan aan dan Keuangan	

		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	68.000.000	100%	2.750.000	100%	35.300.000	100%	45.300.000	100%	49.830.000	100%	54.813.000		
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	5 Stell	5 Stell	13.000.000	100%	2.750.000	1 Paket	15.300.000	1 Paket	15.300.000	1 Paket	16.830.000	1 Paket	18.513.000	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 OK	11 OK	55.000.000			6 Orang	20.000.000	6 Orang	30.000.000	6 Orang	33.000.000	6 Orang	36.300.000	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	202.572.900	12 Bulan	74.419.500	12 Bulan	119.717.700	12 Bulan	132.856.444	12 Bulan	146.142.088	12 Bulan	160.756.297		
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	247 Buah	247 Buah	10.950.300	100%	1.532.800	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.200.000	1 Paket	2.420.000	1 Paket	2.662.000	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Buah	9 Buah	57.300.000												
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	41315 Lembar	41315 Lembar	23.281.600	12 Bulan	21.217.700	1 Paket	21.217.700	1 Paket	24.506.444	1 Paket	26.957.088	1 Paket	29.652.797	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 Eks/Bulan	36 Eks/Bulan	4.080.000										Kasubbag Umum dan Kepegaw aian		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 OP	23 OP	106.961.000	100%	51.669.000	1 Laporan	96.500.000	1 Laporan	106.150.000	1 Laporan	116.765.000	1 Laporan	128.441.500	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianhya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	12 Bulan		61.500.000		-		-		30.500.000		-		-		
		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Dinas	1 Buah	1 Buah	35.000.000												
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan	32 Buah	32 Buah	26.500.000				2 Unit	30.500.000							
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan	32 Buah	32 Buah	26.500.000				2 Unit	24.000.000							

		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	309.946.500	12 Bulan	240.403.000	12 Bulan	172.962.300	12 Bulan	277.649.295	12 Bulan	305.414.225	12 Bulan	335.955.647		
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Listrik, Air dan Telpn	12 Bulan	12 Bulan	121.200.000	12 Bulan	86.400.000	12 Bulan	86.400.000	12 Laporan	99.792.000	12 Bulan	109.771.200	12 Bulan	120.748.320	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	188.746.500	12 Bulan	154.003.000	12 Bulan	86.562.300	12 Laporan	177.857.295	12 Bulan	195.643.025	12 Bulan	215.207.327	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	93.032.000	12 Bulan	48.475.000	12 Bulan	41.720.000	12 Bulan	60.988.625	12 Bulan	61.587.488	12 Bulan	67.746.236		
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17 Buah	17 Buah	70.842.000	12 Bulan	48.475.000	12 Bulan	41.720.000	12 Unit	55.988.625	12 Bulan	61.587.488	12 Bulan	67.746.236	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	53 Kali	53 Kali	22.190.000					12 Unit	5.000.000				Kasubbag Umum dan Kepegaw aian		
Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan an	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)						PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	8 Pelayanan	8 Pelayanan													
		7	01	02			PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	85%	205.704.200	86 Nilai	117.435.000	87 Nilai	43.120.000	88 Nilai	70.232.000	89 Nilai	77.255.200	90 Nilai	84.980.720		
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Keg		12.000.000	1	12.000.000	1	-	1	22.800.000	1	25.080.000	1	27.588.000		
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100%		12.000.000	100%	12.000.000	100%		100%	22.800.000	100%	25.080.000	100%	27.588.000	Kasi Penyelenggara Pemerintah an	

		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan publik sesuai SOP, Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindak lanjuti	100%	100%	193.704.200	100%	105.435.000	100%	43.120.000	100%	47.432.000	100%	52.175.200	100%	57.392.720		
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan	12 Bulan		193.704.200	12 Bulan	105.435.000	12 Bulan	43.120.000	12 Bulan	47.432.000	12 Bulan	52.175.200	12 Bulan	57.392.720	Kasi Pelayanan Publik	
Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Desa/Kelurahan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	15 Desa	15 Desa													
		7	01	03			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%	100%	1.176.156.854	100%	1.083.474.600	100%	1.436.321.000	100%	1.472.115.000	100%	1.505.758.854	100%	1.546.015.994		
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	100%	5.555.000	100%	208.225.000	100%	229.047.500	100%	251.952.250	100%	277.147.475		
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	100%	5.555.000		204.175.000		224.592.500		247.051.750		271.756.925	Kel. Batu Piring	
		7	01	03	2.01	03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		-		1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	4.455.000	1 Dokumen	4.900.500	1 Dokumen	5.390.550	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	100%	100%	-	100%	-	100%	39.840.000	100%	74.484.000	100%	81.932.400	100%	90.125.640		
		7	01	03	2.02	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen						1 Dokumen	15.540.000	1 Dokumen	17.094.000	1 Dokumen	18.803.400	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.02	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen						1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Kel. Batu Piring		

		7	01	03	2.02	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen						1 Dokumen	4.120.000	1 Dokumen	4.532.000	1 Dokumen	4.985.200	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.01		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	100%	-	100%	39.840.000	100%	43.824.000	100%	48.206.400	100%	53.027.040		
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	10 Keluarga		-				10 Keluarga	4.735.000	10 Keluarga	5.208.500	10 Keluarga	5.729.350	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.01	03	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga		-		10 Keluarga	39.840.000	10 Keluarga	43.824.000	10 Keluarga	48.206.400	10 Keluarga	53.027.040	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PersentaseAkomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	100%	100%	1.176.156.854	100%	1.077.919.600	100%	1.188.256.000	100%	1.199.243.500	100%	1.205.600.204	100%	1.215.841.479		
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100 OK	100 OK	6.525.000		6 Lembaga Kemasyarakatan	39.875.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	43.862.500	6 Lembaga Kemasyarakatan	48.248.750	6 Lembaga Kemasyarakatan	53.073.625	Kel. Batu Piring		
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah sarana dan Prasarana yang dibangun	100%	100%	719.050.000	100%	750.000.000	2 Unit	785.770.400	2 Unit	785.770.400	2 Unit	719.050.000	2 Unit	719.050.000	Kel. Batu Piring	
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%	384.137.454	100%	320.919.600	4 Pokmas / Ormas	320.370.600	4 Pokmas / Ormas	320.370.600	4 Pokmas / Ormas	384.137.454	4 Pokmas / Ormas	384.137.454	Kel. Batu Piring	
		7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	100 OK	100 OK	66.444.400	100%	7.000.000	1 Laporan	42.240.000	1 Laporan	49.240.000	1 Laporan	54.164.000	1 Laporan	59.580.400	Kel. Batu Piring	
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	7	01	05			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	15 Desa	15 Desa													

		7	01	05			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	100%	-	100%	-	100%	25.320.000	100%	45.480.000	100%	50.028.000	100%	55.030.800		
		7	01	05	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	25.320.000	100%	45.480.000	100%	50.028.000	100%	55.030.800		
		7	01	05	2.01	07	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan				1 Laporan	25.320.000	1 Laporan	45.480.000	1 Laporan	50.028.000	1 Laporan	55.030.800	Kasi Pemerint ahan Umum dan Koordinas i Trantib		
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	7	01	05			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa													
		7	01	05			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	100%	238.920.000	100%	229.040.000	100%	129.350.000	100%	142.285.000	100%	156.513.500	100%	172.164.850		
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100%	100%	238.920.000	100%	229.040.000	100%	129.350.000	100%	142.285.000	100%	156.513.500	100%	172.164.850		
		7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	189 Ok	189 Ok	199.520.000	100%	217.045.000	100%	129.350.000	100%	142.285.000	100%	156.513.500	100%	172.164.850	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	50 OK	50 OK	39.400.000	100%	11.995.000								Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi i Trantib		

Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	15 Desa	15 Desa													
								Kesesuaian Perencanaan Desa Dengan Kegiatan	100%	100%													
		7	01	06			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik, Persentase desa dengan pencatatan aset desa baik, Persentase hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100%	100%	334.250.000	100%	272.860.000	100%	46.327.500	100%	91.276.750	100%	100.404.425	100%	110.444.868		
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan, Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa sesuai aturan	100%	100%	334.250.000	100%	272.860.000	100%	46.327.500	100%	91.276.750	100%	100.404.425	100%	110.444.868		
		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen					1 Dokumen	5.742.500	1 Dokumen	6.316.750	1 Dokumen	6.948.425	1 Dokumen	7.643.268	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan	243.180.000	100%	213.840.000	100%	2.000.000	1 Dokumen	7.491.000	1 Dokumen	8.240.100	1 Dokumen	9.064.110	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap, Persentase desa dengan pencatatan aset desa sesuai aturan	50 OK	50 OK	58.400.000	100%	40.000.000	100%		1 Dokumen	25.775.000	1 Dokumen	28.352.500	1 Dokumen	31.187.750	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen					1 Dokumen	21.495.000	1 Dokumen	32.895.000	1 Dokumen	36.184.500	1 Dokumen	39.802.950	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	

		7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	100 OK	100 OK	8.470.000	100%	6.320.000	100%		100%	-	100%	-	100%	-	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
		7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	150 OK	150 OK	24.200.000	100%	12.700.000	100%	17.090.000	100%	18.799.000	100%	20.678.900	100%	22.746.790	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
JUMLAH											5.606.143.454		5.064.379.034		5.064.379.034		5.691.116.267		6.107.610.248		6.608.052.527		

MATRIK RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA

MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	-	87	88	89	90
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	-	75	75	75	75
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021–2026. Renja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok.

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jln. Temenggung Jalil Muara Pitap No. 1 Kelurahan Batu Piring KP 71600

KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor: 560/ /CPS-BLG/2025

TENTANG

**PENETAPAN RANHIR RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2025**

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- | | | |
|-----------|----|--|
| Menimbang | a. | bahwa untuk kelancaran program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan pada tahun 2025 perlu di bentuk suatu Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja Tahun 2025 ; |
| | b. | bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan ; |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); |
| | 2. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; |
| | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) |
| | 4 | Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2); |
| | 5 | Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3); |
| | 6 | Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |
| | 7 | Perbub Nomor 28 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah. |

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025 sebagai rencana pembangunan jangka pendek pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar dalam membuat RKA/DPA SKPD Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : Paringin Selatan
Pada tanggal : Agustus 2024

CAMAT PARINGIN SELATAN,



RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP
NIP. 19720421 199603 2 005

